

LAPORAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 2021



Pemerintah Kota Yogyakarta

2022

Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik

Pemerintah Kota Yogyakarta

2022

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Akses yang mudah dan berkeadilan terhadap informasi publik merupakan salah satu kunci dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis. Ketersediaan informasi publik dapat meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Tak hanya itu, informasi publik juga memainkan peranan yang penting bagi pengembangan pengetahuan dan kesejahteraan warga.

Indonesia telah menjamin hak Warga Negara dalam memperoleh informasi publik melalui penetapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa Badan Publik, baik lembaga negara maupun organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri, wajib melaksanakan pelayanan informasi publik.

Komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mendukung keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan partisipatif sesungguhnya telah tercetus jauh sebelum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 diterapkan. Pada tahun 2003, Pemerintah Kota Yogyakarta memperkenalkan layanan bernama Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK). Melalui layanan berbasis SMS ini, publik dapat melayangkan keluhan atau meminta informasi seputar layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pada tanggal 5 Agustus 2011, dilaksanakan penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama melalui Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 497/KEP/2011 tentang Penetapan Pengelola PPID Kota Yogyakarta pada tanggal 5 Agustus 2011. Untuk melaksanakan fungsi koordinasi dan konsolidasi, dibentuk pula Tim Pertimbangan PPID yang terdiri dari Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten Umum, dan unsur pejabat struktural pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

Sejalan dengan perubahan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, pada tahun 2021 diterbitkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 241 Tahun 2021 tentang Penunjukan PPID dan PPID Pembantu. Keputusan ini menetapkan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta sebagai PPID Utama yang bertanggung jawab kepada Walikota Yogyakarta.

Selain itu, ditetapkan pula 52 PPID Pembantu yang bertugas melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah. Ketugasan PPID Pembantu ini melekat pada jabatan Sekretaris untuk OPD setingkat eselon II dan Pejabat Struktural yang membidangi Tata Usaha untuk OPD setingkat eselon III. Tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi bagian dari PPID Pembantu.

Sebagai pedoman pelaksanaan tugas, telah disusun pula Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik Kota Yogyakarta yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Nomor 47/SEKDA/2014. SOP ini kemudian disempurnakan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Nomor: 34/KEP/XII/2017.

Pelayanan terhadap permohonan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta saat ini dilakukan secara terpusat pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Meskipun demikian, mengingat banyaknya informasi publik yang dikuasai oleh tiap-tiap PPID Pembantu, penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi publik menjadi tanggung jawab dari masing-masing PPID Pembantu.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik, setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik sekurang-kurangnya melalui 2 (dua) media yaitu website dan papan pengumuman.

Untuk media website, Pemerintah Kota Yogyakarta telah memuat informasi publik pada portal jogjakota.go.id. Informasi tersebut juga dapat diakses pada subdomain ppid.jogjakota.go.id. Pada tahun 2019, seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja hingga di tingkat Kelurahan telah memiliki dan mengelola Sub Domain/Website. Konten informasi publik di setiap subdomain ini diupayakan memuat informasi publik yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.



Gambar 1. Tangkapan Layar Portal Jogjakota.go.id



Gambar 2. Tangkapan Layar Sub Domain ppid.jogjakota.go.id

Informasi publik terkait pelaksanaan program kota dan kegiatan Walikota/Wakil Walikota juga dapat diakses melalui aplikasi android Jogja Smart Service dan media sosial yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta.

Saat ini terdapat tiga *platforms* media sosial yang digunakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu Twitter (PemkotJogja), Instagram (@pemkotjogja), dan Facebook (Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta).

Papan pengumuman dalam bentuk klasikal maupun digital telah disediakan di beberapa titik di kantor Balaikota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta juga menggunakan media cetak seperti surat kabar dan majalah, media elektronik seperti radio dan televisi lokal, serta media luar ruang dalam bentuk baliho. Pada tahun 2021, Pelayanan informasi tatap muka dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sosialisasi secara terbatas sebagai akibat dari pandemic Covid-19.

Selain memberikan pelayanan informasi publik, Pemerintah Kota Yogyakarta juga menyelenggarakan pelayanan permohonan informasi publik. Untuk menunjang pelayanan permohonan ini, telah disediakan sebuah ruangan yang difungsikan secara khusus untuk melayani masyarakat yang datang langsung dan mengajukan permohonan informasi publik.



Gambar 3. Fasilitas Pelayanan Informasi Publik

Ruang Pelayanan Informasi ini berada di Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta dan dilengkapi dengan satu unit komputer, satu pesawat telepon, dan tempat duduk untuk petugas dan penerima layanan. Publik juga dapat melakukan permohonan informasi secara online dan penyampaian keberatan melalui ppid.jogjakota.go.id dan e-mail ppid@jogjakota.go.id. Layanan online melalui website ini telah tersedia sejak tahun 2019.

Masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan terkait Pemerintah Kota Yogyakarta juga dapat mengakses layanan UPIK melalui SMS 08122780001 dan aplikasi Jogja Smart Service yang dapat diunduh melalui ponsel berbasis android. Permohonan informasi publik yang disampaikan melalui kanal pengaduan dan informasi ini akan diproses sesuai dengan tata cara dan prosedur pelayanan informasi melalui PPID.

Secara umum, pelayanan permohonan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja (Senin – Kamis 07.30 – 15.30 dan Jumat 07.30 – 14.30 dengan waktu istirahat 12.30 – 13.00). Sementara untuk layanan UPIK dan JSS dapat dimanfaatkan setiap hari.

B. Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta melekat pada Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian. Secara khusus, ketugasan tersebut diampu oleh Seksi Pelayanan Informasi Publik, Pengelolaan Aduan, dan Keluhan pada Bidang Komunikasi Publik.

Untuk dapat melaksanakan fungsi dan ketugasan tersebut, dibutuhkan tenaga Arsiparis, Pustakawan, Pranata Hubungan Masyarakat, dan Pranata Komputer. Pada Tahun Anggaran 2021, terdapat empat orang pegawai yang melaksanakan kegiatan operasional pelayanan informasi dan dokumentasi. Tenaga ini juga mengampu ketugasan di bidang lain dan tidak seluruhnya memenuhi kompetensi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan fungsi dan ketugasan tersebut. Sebagai gambaran, dari seluruh petugas, hanya ada satu pegawai yang pernah mengikuti sertifikasi budaya dokumentasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, Pemerintah Yogyakarta secara rutin melakukan pengembangan kapasitas dengan menyelenggarakan rapat dan diseminasi informasi. Pada tahun 2021, Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan diseminasi informasi terkait dengan kegiatan monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

Mengingat pentingnya sinergi internal antar pengelola informasi publik, PPID Utama Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan koordinasi dan *update* informasi dengan PPID Pembantu guna memantau perkembangan layanan dan mengumpulkan aspirasi dan masukan dari masing-masing PPID. PPID Kota Yogyakarta juga berpartisipasi aktif pada Forum Koordinasi PPID tingkat DIY yang beranggotakan PPID utama Kabupaten/Kota/Pemda DIY serta Komisi Informasi Daerah DIY serta menghadiri acara-acara yang diselenggarakan pihak lain yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik

C. Anggaran

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan PPID seperti rapat koordinasi, workshop, diseminasi, dan FGD PPID serta pengelolaan informasi publik di tingkat kota Yogyakarta dibebankan dalam anggaran kegiatan Pengelolaan Keluhan dan Aduan di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Sementara untuk pengelolaan informasi publik di OPD, pembiayaan dibebankan pada anggaran masing-masing OPD.

Pada Tahun 2021, anggaran murni untuk Pengelolaan Keluhan dan Aduan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah **Rp.300.387.200,-** atau meningkat sebanyak **Rp. 66.747.200,-** dari tahun sebelumnya.

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2021, terdapat **40** permohonan informasi melalui PPID yang diterima oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Jumlah ini mengalami penurunan yang dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, jumlah pemohon informasi melalui jalur PPID adalah sebanyak 36 melalui email.

Sebagian besar informasi publik yang diminta digunakan untuk kepentingan akademis sedangkan tujuan penggunaan yang lain adalah untuk kelengkapan pengajuan izin serta bahan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Sebagian besar pemohon mengajukan permohonan informasi publik secara online. Ada 4 (empat) pemohon yang melakukan pengajuan informasi secara langsung.

Dari jumlah total tersebut, 20 permohonan dikabulkan seluruhnya dan 4 permohonan informasi yang diberikan sebagian. 12 permohonan informasi ditolak karena informasi yang diminta ada 1 informasi yang dikecualikan, 7 karena informasi tidak dikuasai dan 4 lainnya karena Pemohon tidak dapat melengkapi syarat permohonan.

Jumlah pemohon informasi melalui email PPID di kota Yogyakarta tahun 2021 tergolong rendah apabila dibandingkan dengan daerah lain, Hal ini mungkin disebabkan karena Pemerintah Kota Yogyakarta juga membuka akses permohonan informasi melalui mekanisme lain seperti pada Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) melalui media SMS dan aplikasi Jogja Smart Service. Permohonan informasi yang bersifat sederhana dan umum dapat dilayani secara langsung menggunakan prosedur UPIK. Namun, apabila permohonan informasi bersifat kompleks, membutuhkan dokumen-dokumen penting, dan harus melewati proses pengkajian tertentu, barulah permohonan tersebut diproses melalui jalur PPID.

No	Bulan	Jumlah	Waktu (hari kerja)	Total Diberikan	Diberikan			Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian	Ditolak	Dikecualikan	Tidak Dikuasai	Lainnya
1	Januari	3	12,0	2	1	1	1	0	1	0
2	Februari	1	10,0	1	0	1	0	0	0	0
3	Maret	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	9	9,6	7	6	1	2	1	0	1
5	Mei	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	3	13,7	3	3	0	0	0	0	0
7	Juli	3	0,0	2	2	0	1	0	1	0
8	Agustus	1	0,0	0	0	0	1	0	1	0
9	September	2	3,5	0	0	0	2	0	2	0
10	Oktober	4	6,5	2	2	0	2	0	2	0
11	November	5	12,75	4	3	1	1	0	0	1
12	Desember	5	6	3	3	0	2	0	0	2
	TOTAL	36	6,2	24	20	4	12	1	7	4

*)Total jumlah permohonan informasi yang masuk pada tahun 2021 adalah 40 permohonan, namun empat di antaranya, pemohon diarahkan langsung ke OPD terkait karena data yang diminta berupa wawancara

*)Penolakan permohonan informasi dengan alasan "lainnya" dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

IV. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2021 tidak ada sengketa informasi publik.

V. CAPAIAN PPID

Selama tahun 2021, PPID Pemerintah Kota Yogyakarta telah meraih beberapa pencapaian berikut:

1. Pengembangan dan supervisi 45 web Kelurahan sebagai salah satu media informasi dan komunikasi. Informasi yang ditampilkan diupayakan memenuhi standar keterbukaan informasi publik.
2. Penyelesaian permohonan informasi publik ada yang memerlukan waktu 1 hari kerja, namun ada penyelesaian yang memerlukan waktu 10 hari kerja. Sebagian besar informasi publik yang diperoleh dari Perangkat Daerah masih membutuhkan pengolahan data lebih lanjut untuk memenuhi standar keamanan informasi.

VI. KENDALA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- 1). Kompetensi pelaksana dalam memberikan pelayanan informasi publik baik pada PPID Utama maupun PPID Pembantu perlu ditingkatkan;
- 2). PPID Pembantu memiliki komitmen terhadap keterbukaan informasi publik namun belum sepenuhnya memahami aturan dan prosedur pelayanan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang dan Peraturan Komisi Informasi;
- 3). *Transfer of knowledge* terkait pelayanan informasi publik antar pegawai masih rendah;
- 4). Partisipasi Perangkat Daerah terutama PPID Pembantu di tingkat Kemantren terhadap kegiatan Monitoring dan Evaluasi KID DIY sangat rendah;
- 5). Aturan, Dasar Hukum, dan kesepakatan internal seperti Daftar Informasi yang Dikecualikan dan Standar serta Prosedur Operasional terkait pelayanan informasi publik perlu direview kembali.

VII. RENCANA PENGEMBANGAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK


- 1) Peningkatan kompetensi bagi petugas pelaksana layanan informasi publik melalui pelatihan dengan Komisi Informasi Daerah DIY;

- 2) Diseminasi informasi terkait PPID dengan jumlah peserta yang terbatas sehingga pendampingan dapat dilakukan dengan lebih optimal;
- 3) Pendampingan lebih intensif bagi PPID Pembantu di Kecamatan;
- 4) Review terhadap pola pelayanan informasi publik dan *updating* DIK.

Yogyakarta, 31 Maret 2022

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan
Persandian

Selaku PPID Utama


Ignatius Trihastono, S.Sos, MM
NIP/ 19690723 199603 1 005

LAMPIRAN

Permohonan Informasi kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Bulan	Jumlah	Waktu/Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai	Lainnya
1	Januari	1	5	1	1	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	1	10	1	1	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	2								

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi kepada Dinas Perindustrian

No	Bulan	Jumlah	Waktu/Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai	Lainnya
1	Januari	1	10	1	1	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	1	14	1	0	1	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	2								

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Bulan	Jumlah	Waktu/Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai	Lainnya
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	2	2	2	2	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	1	0	0	0	0	1	0	1	0
7	Juli	1	0	0	0	0	1	0	1	0
8	Agustus	1	0	0	0	0	1	0	1	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	1	0	0	0	0	1	0	1	0
	Total	6								

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

No	Bulan	Jumlah	Waktu/Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai	Lainnya
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	1	10	1	1	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	1	10	1	1	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	1	17	1	1	0	0	0	0	0
7	Juli	1	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	1	13	1	1	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	1	5	1	1	0	0	0	0	0
	Total	6								

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

No	Bulan	Jumlah	Waktu/Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai	Lainnya
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	1	1	1	0	1	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	1								

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi kepada Dinas Perhubungan

No	Bulan	Jumlah	Waktu/Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai	Lainnya
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	1	0	0	0	0	1	0	1	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	total	1								

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi kepada Dinas Kesehatan

No	Bulan	Jumlah	Waktu/Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai	Lainnya
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	1	3	1	1	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	1	0	0	0	0	1	0	1	0
	Total	2								

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi kepada Dinas Pendidikan

No	Bulan	Jumlah	Waktu/Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai	Lainnya
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	1	4	1	1	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	1								

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi kepada Bagian Umum dan Protokol

No	Bulan	Jumlah	Waktu/Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai	Lainnya
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	2	8	2	2	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	2								

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Bulan	Jumlah	Waktu/Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak Dikuasai	Lainnya
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	2	2	0	0	0	2	0	2	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	2								

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi kepada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Bulan	Jumlah	Waktu/Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai	Lainnya
1	Januari	1	14	0	0	0	1	0	1	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	1	0	0	0	0	1	1	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	2								

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi kepada Dinas Pariwisata

No	Bulan	Jumlah	Waktu/Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai	Lainnya
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	1	11	1	1	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	1	0	0	0	0	1	0	0	1
12	Desember	1	5	1	1	0	0	0	0	0
	Total	3								

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Bulan	Jumlah	Waktu/Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai	Lainnya
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	5	8	2	2	0	3	0	3	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	1	11	1	1	0	0	0	0	0
	Total	6								

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi kepada Dinas Perdagangan

No	Bulan	Jumlah	Waktu/Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai	Lainnya
1	Januari	1	10	1	0	1	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	2	0	1	0	1	1	0	1	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	3								

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

No	Nama OPD	Bulan												Jumlah	Waktu/ Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec				Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak Dikuasai	Lainnya
1	Satuan Polisi Polisi Pamong Praja	NIHIL																				
2	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan																					
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah																					
4	DPRD Kota Yogyakarta																					
5	Dinas Pertanian dan Pangan																					
6	Inspektorat																					
7	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)																					
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana																					
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																					
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																					
11	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan																					
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil																					
13	Dinas Lingkungan Hidup																					

14	RSUD Kota Yogyakarta	<h1>NIHIL</h1>
15	Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta	
16	Kemantren Tegalsrejo	
17	Kemantren Gedongtengen	
18	Bagian Hukum	
19	Bagian Administrasi Pembangunan	
20	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	
21	Bagian Perekonomian Dan	
22	Kemantren Pakualaman	
23	Kemantren Ngampilan	
24	Kemantren Mantriweron	
25	Kemantren Kotagede	
26	Kemantren Gondomanan	
27	Perumda BPR Bank Jogja	
28	Bagian Organisasi	
29	Kemantren Wirobrajan	
30	Kemantren Gondokusuman	
31	Kemantren Danurejan	
32	Kemantren Kraton	
33	Kemantren Jetis	
34	PD Jogjatama Vishesha	
35	Bagian Tata Pemerintahan	
36	Bagian Administrasi dan Keuangan	
37	Bagian Kesejahteraan Rakyat	
38	Kemantren Mergangsan	
39	Kemantren Umbulharjo	